

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Masyhur Effendi, 2005 *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, Bogor
- A. Ubadillah dkk., 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Aloysius Wiyono, dkk., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2018, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, cetakan kelima, cv.mandar maju, Bandung,
- Edi Suharto, 2013, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, CV AbsoluteMedia, Bantul
- Iman Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta
- Masyhur Effendi. 1994 *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Alim, 2001, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Yogyakarta
- Nur Basuki Winanmo, 2018, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Peter Medawar Dalam Bill Bryson, 2021, *The Body Pedoman Bagi Penghuni*, Cetakan Pertama, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta

- Ridwan HR, 2006 *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta
- Radik Purba, 2011, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta
- Sugeng Pujileksono, 2016, *Perundang-Undangan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, Perspektif Pemenuhan Keadilan & Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Setara Press, Malang
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta
- Vladimir Rys, 2011, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial : Kembali Ke Prinsip- Prinsip Dasar*, Cetakan Kesatu, PT.Pustaka Alvabet, Jakarta Timur
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal/Internet

- Analisis Yuridis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemicorona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Ayuna Widya Silviana Sari, Ahmad Suhaimi dan Triyo Ambodo
- Berita Kemenaker, "Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19 "2020, Survei-kemnaker- 88-persen-perusahaan-terdampak-pandemi-covid-19. Di akses tanggal 15 desember 2021
- Erlina Burhan, dkk, 2020, *Pedoman Tatalaksana Covid-19*. Lima Organisasi Profesi (PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI), Edisi 2, Jakarta
- Hubaib Alif Khariza, 2015, *Program Jaminan Kesehatan Nasional: Studi Deskriptif Tentang Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Jiwa Menur*, Universitas Airlangga, Surabaya
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 30 Januari 2021
- Wicipto Setiadi, 2009 Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang—ndangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*,
- Wirawan, Kekhawatiran Umat Islam Indonesia akan Status Halal Vaksin Covid- 19 Disorot Media Amerika (Online), 2020, <https://www.kompas.com/global/read/2020/12/20/173249070/kekhawatiran-umat-islam-indonesiaakan-status-halal-vaksin-covid-19?page=all> (09 Januari 2022, 01.01) di akses tanggal 15 desember 2021

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).